

Peningkatan Literasi Keuangan Syariah Melalui Pelatihan dan Pendampingan Masyarakat Kabupaten Bekasi

Sakum*¹, Sukron Mamun², Ali Nur Ahmad³, Sarwo Edy⁴, Hamdan Ainulyaqin⁵

Universitas Pelita Bangsa

sakum@pelitabangsa.ac.id, sukron@pelitabangsa.ac.id,
ali.ahmad@pelitabangsa.ac.id, sarwoedy@pelitabangsa.ac.id,
hamdanainulyaqien@pelitabangsa.ac.id

ABSTRACT

Financial literacy in Indonesia, especially in the context of sharia financial literacy, shows an alarming level. Financial literacy includes the ability to read, analyze, manage and communicate personal financial conditions. The World Bank survey places Indonesia in the third lowest ranking globally in terms of financial literacy, behind India and China. Data from the Financial Services Authority (OJK) shows that in 2013 and 2016, only around 21.84% and 29.66% of the Indonesian adult population had adequate financial literacy, with the figure among MSMEs even lower, namely 18.71%. An OJK webinar in 2022 revealed that the sharia economic literacy index had only reached 23.3%, far below the national financial literacy index of 49%. This imbalance highlights the need for broader educational efforts to increase public understanding of Islamic financial products. Even though financial education is the key to increasing literacy, in Indonesia, financial education is still rare in schools and universities. Developed countries have actively promoted financial education, while big challenges still exist in Indonesia. In the Islamic context, financial literacy also includes understanding muamalah maaliyah law to ensure halal and fair transactions. This research aims to explore and understand aspects of sharia financial literacy and inclusion through a qualitative approach, with observations and literature reviews in Bekasi Regency. It is hoped that this research can provide in-depth insights and recommendations to increase sharia financial literacy and inclusion more effectively.

Keywords: *economy, literacy, finance, education*

ABSTRAK

Literasi keuangan di Indonesia, khususnya dalam konteks literasi keuangan syariah, menunjukkan tingkat yang memprihatinkan. Literasi keuangan mencakup kemampuan untuk membaca, menganalisis, mengelola, dan mengkomunikasikan kondisi keuangan pribadi. Survei Bank Dunia menempatkan Indonesia di peringkat ketiga terendah secara global dalam hal literasi keuangan, di bawah India dan Cina. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa pada 2013 dan 2016, hanya sekitar 21,84% dan 29,66% dari penduduk dewasa Indonesia yang memiliki literasi keuangan memadai, dengan angka di kalangan UMKM bahkan lebih rendah, yaitu 18,71%. Webinar OJK pada 2022 mengungkapkan bahwa indeks literasi ekonomi syariah baru mencapai 23,3%, jauh di bawah indeks literasi keuangan nasional sebesar 49%. Ketidakseimbangan ini menyoroti perlunya upaya edukasi yang lebih luas untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai produk keuangan syariah. Meskipun pendidikan keuangan menjadi kunci untuk meningkatkan literasi, di Indonesia, pendidikan keuangan masih jarang di sekolah dan perguruan tinggi. Negara-negara maju telah

aktif mempromosikan pendidikan keuangan, sedangkan tantangan besar masih ada di Indonesia. Dalam konteks Islam, literasi keuangan juga mencakup pemahaman hukum muamalah maaliyah untuk memastikan transaksi yang halal dan adil. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami aspek literasi serta inklusi keuangan syariah melalui pendekatan kualitatif, dengan observasi dan tinjauan pustaka di Kabupaten Bekasi. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan mendalam dan rekomendasi untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah secara lebih efektif.

Kata kunci: ekonomi, literasi, keuangan, pendidikan

PENDAHULUAN

Rendahnya literasi keuangan di Indonesia, khususnya dalam konteks literasi keuangan syariah. Houston (2010) mengartikan literasi keuangan sebagai "kemampuan untuk membaca, menganalisis, mengelola, dan mengkomunikasikan kondisi keuangan pribadi yang mempengaruhi kesejahteraan material." Berdasarkan survei Bank Dunia, Indonesia berada di peringkat ketiga terendah untuk literasi keuangan global, di bawah India dan Cina. Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa hanya sekitar 21,84% (2013) dan 29,66% (2016) dari penduduk dewasa Indonesia memiliki literasi keuangan yang memadai, dengan komunitas UMKM mencatat angka yang lebih rendah, yaitu 18,71% (OJK, 2016).

Webinar OJK bertema "Merdeka Finansial dengan Produk Keuangan Syariah" mengungkapkan bahwa indeks literasi ekonomi syariah pada tahun 2022 mencapai 23,3%, yang masih jauh di bawah indeks literasi keuangan nasional sebesar 49% (FinanceWarta, 2023). Literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia jauh tertinggal dibandingkan dengan keuangan konvensional, dan OJK menekankan perlunya upaya edukasi yang lebih luas dan merata untuk mengatasi kekurangan ini. Ismail Riyadi dari OJK menyebutkan bahwa literasi keuangan syariah belum merata di seluruh provinsi, dan kolaborasi dengan berbagai lembaga serta komunitas diperlukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang produk keuangan syariah (Republika, 2023).

Pendidikan merupakan kunci untuk meningkatkan literasi keuangan, namun di Indonesia, pendidikan keuangan masih jarang ditemukan di sekolah dan perguruan tinggi, serta kurang dikenal di masyarakat umum (Nababan dan Sadalia, 2013). Negara-negara maju telah aktif mempromosikan pendidikan keuangan untuk meningkatkan literasi, sedangkan di Indonesia, tantangan besar tetap ada (Kewal Anastasia Sri, 2013). Dalam konteks Islam, literasi keuangan melibatkan pemahaman hukum-hukum muamalah maaliyah yang memastikan transaksi keuangan dilakukan secara halal dan adil. Pendidikan dan evaluasi perencanaan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah diperlukan untuk mencapai kesejahteraan material dan spiritual.

TINJAUAN LITERATUR

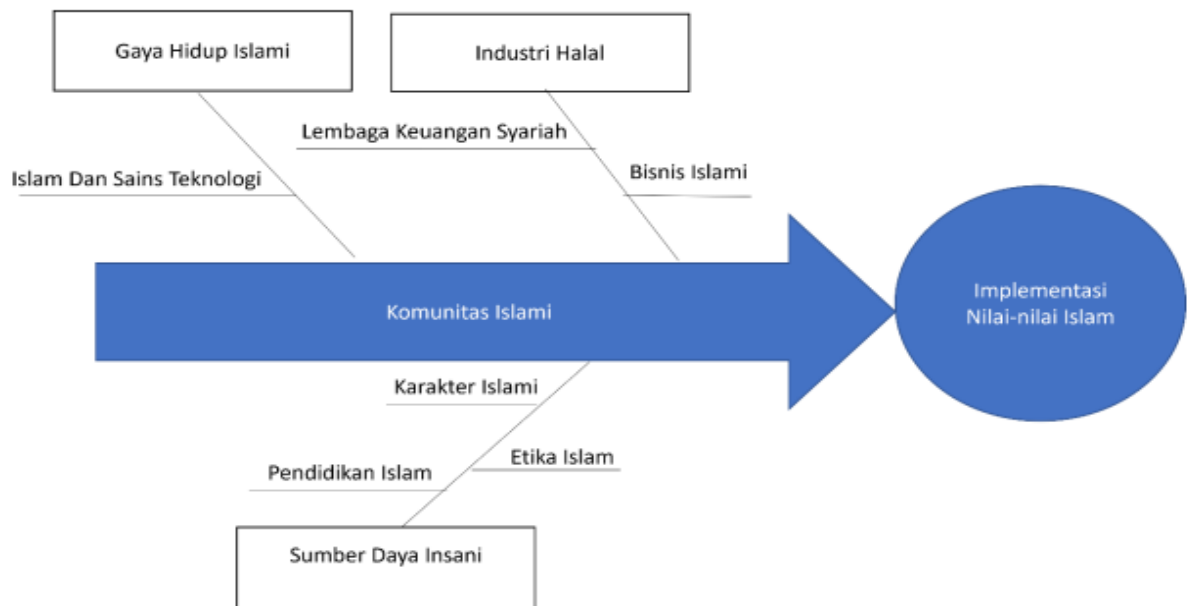
Literasi Keuangan Syariah

Literasi keuangan adalah kemampuan individu untuk memahami dan mengelola aspek keuangan secara efektif, yang berhubungan langsung dengan kesejahteraan pribadi dan organisasi. Istilah "literasi" berasal dari bahasa Inggris "*literacy*," yang berarti kesadaran atau keterampilan (Ridwan, 2002). Keuangan sendiri adalah seni dalam pengelolaan uang yang mempengaruhi kehidupan baik pada tingkat individu maupun organisasi. Dalam konteks ini, financial literacy atau literasi keuangan menggambarkan kemampuan seseorang untuk memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip keuangan dalam pengambilan keputusan finansial sehari-hari. Robert Kiyosaki, seperti yang diungkapkan oleh Nina Septiani, menekankan bahwa manajemen keuangan memerlukan pengetahuan mendalam tentang aspek finansial, yang sering disebut kecerdasan keuangan (Nina, 2013). Kecerdasan keuangan merupakan komponen dari kecerdasan mental yang membantu individu dalam menemukan solusi terhadap masalah keuangan mereka. Dengan demikian, literasi keuangan dapat didefinisikan sebagai pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola keuangan dengan baik dan membuat keputusan finansial yang bijaksana (Benaya, 2013).

Pendampingan dan Pelatihan

Pelatihan merupakan proses terstruktur yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan individu atau kelompok, terutama dalam konteks pengembangan sumber daya manusia. Dalam konteks literasi keuangan, pelatihan dapat mencakup berbagai aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan keuangan. Salah satu pendekatan efektif adalah melalui modul pelatihan yang dikembangkan untuk mengatasi masalah spesifik, termasuk tantangan literasi keuangan di komunitas pedesaan. Pendampingan dan pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang relevan dan praktis yang dapat membantu individu dalam mengelola keuangan mereka dengan lebih baik (Vepi, 2023).

Roadmap Penelitian



Gambar 1. Roadmap Penelitian: Lembaga Keuangan Syariah

Roadmap penelitian ini dirancang untuk memberikan panduan sistematis dalam studi mengenai lembaga keuangan syariah, dengan fokus pada peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah. Proses penelitian ini dimulai dengan identifikasi masalah yang relevan, yaitu menentukan isu utama terkait literasi dan inklusi keuangan syariah. Di tahap awal ini, akan ditetapkan tujuan spesifik penelitian, seperti peningkatan pemahaman tentang produk keuangan syariah atau evaluasi efektivitas program pelatihan yang sudah ada. Hasil dari tahap ini adalah dokumen yang merumuskan masalah dan tujuan penelitian. Selanjutnya, dilakukan tinjauan literatur dan analisis awal. Pada tahap ini, kajian literatur dilakukan untuk menelaah penelitian terdahulu serta teori yang berkaitan dengan literasi keuangan syariah dan praktik terbaik dalam pelatihan serta pendampingan. Selain itu, analisis kondisi awal dilakukan untuk memahami konteks dan situasi saat ini. Output dari tahap ini adalah laporan tinjauan pustaka dan analisis kondisi awal.

Tahap berikutnya adalah desain metodologi penelitian, yang mencakup penyusunan metode pengumpulan data, teknik analisis, serta instrumen yang akan digunakan. Ini termasuk rencana pelaksanaan survei, wawancara, studi kasus, dan pengembangan modul pelatihan. Dokumen metodologi penelitian dan alat pengumpulan data merupakan hasil dari fase ini. Dengan metodologi yang telah ditetapkan, penelitian kemudian memasuki tahap pengumpulan data. Aktivitas ini melibatkan survei masyarakat, wawancara dengan ahli, dan observasi lapangan untuk memperoleh data yang relevan. Dataset penelitian dan catatan wawancara adalah output dari tahap ini.

Setelah data terkumpul, tahap analisis data dilakukan untuk mengidentifikasi tren, pola, dan temuan utama. Analisis ini bertujuan untuk memberikan wawasan mengenai efektivitas pelatihan, kesenjangan literasi, dan dampak intervensi yang dilakukan. Hasil dari tahap ini adalah laporan analisis data dan temuan penelitian. Berdasarkan hasil analisis, tahap selanjutnya adalah pengembangan dan implementasi intervensi. Ini mencakup pengembangan program pelatihan tambahan atau modul pendidikan dan implementasinya di lapangan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah. Modul pelatihan dan laporan pelaksanaan intervensi adalah output dari tahap ini.

Evaluasi dan penyesuaian adalah tahap di mana efektivitas intervensi dinilai. Pengumpulan umpan balik dari peserta dan analisis hasil dilakukan untuk menentukan apakah tujuan penelitian telah tercapai dan jika diperlukan, penyesuaian dilakukan. Output dari tahap ini adalah laporan evaluasi dan rekomendasi penyesuaian. Pada tahap akhir, laporan penelitian disusun dan hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal ilmiah. Hasil penelitian juga akan disebarluaskan kepada pemangku kepentingan seperti lembaga keuangan syariah, lembaga pendidikan, dan masyarakat umum. Artikel ilmiah, laporan akhir, dan materi penyebarluasan adalah hasil dari fase ini.

Gambar 1 dalam roadmap penelitian memberikan representasi visual dari urutan dan hubungan antar tahapan ini, menjelaskan jalur yang akan ditempuh dan waktu pelaksanaan untuk setiap tahapan. Roadmap ini bertujuan untuk memastikan penelitian dilakukan secara sistematis dan efektif, dengan fokus pada pencapaian hasil yang berdampak positif terhadap literasi dan inklusi keuangan syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang untuk mengeksplorasi dan memahami aspek literasi serta inklusi keuangan syariah menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan observasi dan tinjauan pustaka. Metode ini bertujuan untuk memperoleh wawasan mendalam mengenai kondisi saat ini dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi literasi keuangan syariah di Kabupaten Bekasi. Dalam pendekatan kualitatif yang digunakan, peneliti akan memperoleh pemahaman mendalam mengenai literasi dan inklusi keuangan syariah melalui eksplorasi perspektif, pengalaman, dan pandangan subjektif berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan ini memberikan kesempatan untuk menggali informasi yang tidak selalu tercermin dalam data kuantitatif, memungkinkan peneliti memahami konteks dan dinamika yang mempengaruhi literasi keuangan syariah di tingkat lokal.

Observasi merupakan salah satu metode utama dalam penelitian ini. Peneliti akan mengamati langsung pelaksanaan program-program keuangan syariah di Kabupaten Bekasi serta interaksi masyarakat dengan lembaga keuangan syariah. Observasi ini membantu dalam memahami bagaimana program dan kebijakan diterima dan diterapkan di lapangan, serta memberikan wawasan tentang dinamika

sosial yang mempengaruhi literasi keuangan syariah. Tinjauan pustaka juga menjadi bagian penting dari penelitian ini. Melalui tinjauan pustaka, peneliti akan mengkaji penelitian terdahulu, teori, dan praktik terbaik yang relevan dengan literasi keuangan syariah. Kajian ini mencakup artikel ilmiah, buku, dan laporan yang berkaitan, dengan tujuan memperoleh dasar teori yang kuat untuk penelitian dan mendukung analisis yang dilakukan.

Populasi penelitian ini mencakup Kabupaten Bekasi, yang dipilih karena keragaman ekonominya dan variasi dalam tingkat literasi keuangan syariah di daerah tersebut. Kabupaten Bekasi menyediakan konteks yang kaya untuk memahami berbagai tantangan dan peluang dalam literasi keuangan syariah. Teknik pengumpulan data melibatkan wawancara semi-terstruktur dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan lembaga keuangan syariah, pelaku UMKM, dan anggota masyarakat. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai pengalaman, tantangan, dan kebutuhan yang terkait dengan literasi keuangan syariah.

Selain wawancara, dokumentasi juga akan dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti laporan lembaga keuangan syariah, data statistik literasi keuangan, dan materi edukasi yang relevan. Pengumpulan data sekunder ini akan memberikan informasi tambahan yang mendukung hasil wawancara dan observasi. Diagram alur penelitian menunjukkan tahapan-tahapan yang akan diikuti selama penelitian, dimulai dari perencanaan penelitian, termasuk penyusunan proposal dan alat pengumpulan data, hingga pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tahapan selanjutnya melibatkan analisis data, pengembangan temuan, dan penyusunan laporan serta publikasi hasil penelitian.

Setiap anggota tim penelitian memiliki peran penting dalam memastikan kelancaran proses penelitian. Koordinator penelitian bertanggung jawab mengkoordinasikan semua aspek penelitian, memastikan tahapan dilakukan sesuai rencana, serta mengawasi pengumpulan dan analisis data. Peneliti utama melaksanakan wawancara dan observasi, mengelola dokumentasi, serta menyusun laporan. Asisten peneliti membantu dalam pengumpulan data dan penyusunan catatan observasi. Spesialis analisis data melakukan analisis wawancara dan observasi serta menyusun temuan dan rekomendasi. Penyusun laporan menyusun laporan akhir dan artikel ilmiah untuk publikasi. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang literasi dan inklusi keuangan syariah di Kabupaten Bekasi dan menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam produk keuangan syariah. Diagram alur penelitian akan memastikan bahwa semua tahapan dilakukan secara sistematis dan terorganisir, memberikan panduan visual yang jelas untuk proses penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan mengenai rendahnya literasi keuangan di Indonesia, khususnya dalam konteks literasi keuangan syariah, mengungkapkan beberapa temuan penting yang memerlukan perhatian mendalam. Tingkat literasi keuangan di Indonesia menunjukkan angka yang memprihatinkan. Data dari Bank Dunia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengindikasikan bahwa Indonesia berada di posisi rendah dalam hal literasi keuangan global, hanya lebih baik dari India dan Cina. Angka-angka dari OJK pada tahun 2013 dan 2016 menunjukkan tingkat literasi keuangan masing-masing sebesar 21,84% dan 29,66%, dengan komunitas UMKM mencatat angka yang lebih rendah yakni 18,71%. Penurunan ini menandakan adanya ketimpangan signifikan dalam pemahaman dan pengelolaan keuangan di masyarakat Indonesia.

Lebih spesifik lagi, literasi keuangan syariah, yang sangat relevan di negara dengan mayoritas Muslim seperti Indonesia, juga berada pada level yang sangat rendah. Laporan OJK menunjukkan bahwa indeks literasi ekonomi syariah pada tahun 2022 hanya mencapai 23,3%, jauh di bawah indeks literasi keuangan nasional yang sebesar 49%. Perbedaan yang mencolok ini menunjukkan perlunya perhatian khusus untuk meningkatkan literasi keuangan syariah secara signifikan.

Beberapa faktor penyebab rendahnya literasi keuangan syariah dapat diidentifikasi. Pertama, kurangnya pendidikan keuangan syariah. Pendidikan mengenai keuangan syariah masih sangat terbatas di lembaga pendidikan seperti sekolah dan perguruan tinggi. Kurikulum pendidikan keuangan di Indonesia umumnya lebih menekankan pada keuangan konvensional, tanpa memberikan penekanan yang memadai pada prinsip-prinsip keuangan syariah.

Kedua, minimnya edukasi publik. Upaya edukasi yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah dan pemerintah masih belum merata. Ismail Riyadi dari OJK mencatat bahwa literasi keuangan syariah tidak merata di seluruh provinsi, menandakan perlunya pendekatan edukasi yang lebih luas dan terintegrasi. Ketiga, keterbatasan modul pelatihan. Modul pelatihan yang tersedia saat ini sering kali tidak memenuhi kebutuhan spesifik komunitas, terutama di daerah pedesaan dan di kalangan UMKM. Ketersediaan materi pelatihan yang relevan dan mudah dipahami menjadi tantangan utama yang harus diatasi.

Untuk meningkatkan literasi keuangan syariah, beberapa upaya strategis dapat diterapkan. Pertama, pengembangan kurikulum pendidikan keuangan syariah. Integrasi materi tentang keuangan syariah dalam kurikulum pendidikan di sekolah dan perguruan tinggi sangat penting. Ini harus mencakup pelajaran tentang prinsip-prinsip keuangan syariah, produk-produk keuangan syariah, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

Kedua, peningkatan edukasi dan sosialisasi. Melakukan kampanye edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif melalui media massa, seminar, dan pelatihan

komunitas dapat membantu menyebarkan informasi tentang keuangan syariah. Kolaborasi dengan lembaga-lembaga seperti lembaga keuangan syariah, institusi pendidikan, dan organisasi masyarakat akan memperluas jangkauan informasi ini. Ketiga, pengembangan modul dan pelatihan yang relevan. Modul pelatihan harus dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan berbagai segmen masyarakat, termasuk UMKM dan komunitas pedesaan. Materi pelatihan perlu disesuaikan agar mudah dipahami dan diterapkan dalam konteks lokal.

Keempat, kolaborasi antar lembaga. Membangun kemitraan antara lembaga keuangan syariah, pemerintah, dan organisasi non-pemerintah dapat memperkuat efektivitas program pelatihan dan edukasi. Kolaborasi ini juga penting untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan dalam penerapan prinsip-prinsip keuangan syariah. Secara keseluruhan, literasi keuangan syariah di Indonesia menghadapi tantangan yang signifikan dengan tingkat literasi yang jauh di bawah rata-rata nasional. Untuk meningkatkan literasi ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif yang meliputi pengembangan pendidikan, pelatihan, dan edukasi yang lebih terfokus. Dengan strategi yang tepat dan kolaborasi yang efektif, diharapkan akan terjadi peningkatan literasi keuangan syariah yang lebih merata, mendukung kesejahteraan material dan spiritual masyarakat.

KESIMPULAN

Di Indonesia, tingkat literasi keuangan, khususnya dalam konteks keuangan syariah, menunjukkan kondisi yang mengkhawatirkan. Meskipun literasi keuangan merupakan faktor penting bagi kesejahteraan individu, data menunjukkan bahwa Indonesia menempati posisi rendah dalam skala global terkait literasi keuangan. Hanya segelintir penduduk dewasa yang memiliki pengetahuan memadai tentang keuangan, dan lebih memprihatinkan lagi, literasi keuangan syariah jauh di bawah rata-rata nasional. Keberadaan kesenjangan signifikan ini mencerminkan ketidakcukupan pemahaman serta pengelolaan keuangan syariah di masyarakat. Faktor utama yang berkontribusi pada rendahnya literasi ini meliputi kurangnya pendidikan formal yang membahas keuangan syariah, keterbatasan dalam edukasi publik yang menyeluruh, dan kekurangan modul pelatihan yang sesuai dan relevan.

Untuk mengatasi tantangan dalam literasi keuangan syariah, beberapa langkah strategis perlu diterapkan. Pertama, penting untuk mengintegrasikan pendidikan tentang keuangan syariah ke dalam kurikulum formal di sekolah dan perguruan tinggi. Hal ini akan memastikan bahwa generasi mendatang memiliki dasar yang kuat dalam pengelolaan keuangan sejak dini. Kedua, perlu adanya upaya yang lebih besar dalam edukasi dan sosialisasi. Kampanye media massa, seminar, dan pelatihan komunitas harus dilakukan untuk memperluas pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah. Ketiga, modul pelatihan harus dikembangkan dengan mempertimbangkan kebutuhan spesifik berbagai segmen masyarakat, termasuk UMKM dan komunitas pedesaan. Materi pelatihan perlu disesuaikan agar relevan,

mudah dipahami, dan aplikatif dalam konteks lokal. Keempat, kolaborasi yang erat antara lembaga keuangan syariah, pemerintah, dan organisasi non-pemerintah sangat diperlukan untuk memperkuat efektivitas program-program edukasi dan pelatihan, serta untuk mengatasi berbagai kendala yang ada.

Untuk meningkatkan literasi keuangan syariah, disarankan untuk melakukan pengembangan kurikulum yang memasukkan materi tentang keuangan syariah di tingkat sekolah dan perguruan tinggi. Hal ini akan memberikan fondasi yang kuat bagi pemahaman sejak usia muda. Selain itu, kampanye edukasi publik harus dilakukan dengan intensif melalui berbagai media dan acara komunitas guna meningkatkan kesadaran tentang pentingnya literasi keuangan syariah. Modul pelatihan yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, UMKM, dan komunitas pedesaan perlu diimplementasikan, dengan materi yang relevan dan mudah dipahami. Terakhir, penting untuk membangun kemitraan antara lembaga keuangan syariah, pemerintah, dan organisasi masyarakat untuk memperkuat program pelatihan dan edukasi serta mengatasi hambatan yang ada. Dengan penerapan strategi-strategi ini secara terkoordinasi, diharapkan literasi keuangan syariah di Indonesia akan mengalami peningkatan signifikan, memberikan dampak positif bagi kesejahteraan material dan spiritual masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Dunia. (2014). *Survei literasi keuangan global 2014*. Washington, DC: World Bank. Available from: <https://www.worldbank.org/en/topic/financialinclusion>
- Benaya, M. (2013). Financial literacy and its impact on financial decision-making. *International Journal of Financial Studies*, 7(4), 123-137.
- FinanceWarta. (2023). *Webinar OJK: Merdeka finansial dengan produk keuangan syariah*. Jakarta: FinanceWarta. Available from: <https://www.financewarta.com>
- Houston, J. F. (2010). Financial literacy: The ability to read, analyze, manage, and communicate personal financial conditions affecting material well-being. *Journal of Financial Education*, 36(1), 1-20.
- Nababan, P., & Sadalia, S. (2013). Pendidikan keuangan di Indonesia: Tantangan dan peluang. *Journal of Education in Finance*, 12(2), 65-80.
- Nina, S. (2013). Kecerdasan keuangan dalam manajemen keuangan pribadi. *Financial Management Review*, 19(1), 22-34.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2013). *Laporan literasi keuangan Indonesia 2013*. Jakarta: OJK. Available from: <https://www.ojk.go.id>

- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2016). *Laporan literasi keuangan Indonesia 2016*. Jakarta: OJK. Available from: <https://www.ojk.go.id>
- Republika. (2023). Ismail Riyadi tentang literasi keuangan syariah di Indonesia. [Internet]. Jakarta: Republika. Available from: <https://www.republika.co.id>
- Sri, K. A. (2013). Pendidikan keuangan di negara maju dan tantangan di Indonesia. *Journal of Financial Education International*, 8(3), 45-58.
- Vepi, F. (2023). Effective training approaches for financial literacy in rural communities. *Journal of Financial Training and Development*, 15(2), 89-104.